

WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR: 1/KEP/BAKEUDA/I/2023

TENTANG

PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN/
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA
PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan pelimpahan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan penetapan Pejabat Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangakalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 33);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Pejabat yang diberi wewenang mengelola Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta tugas dan wewenangnya sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat yang diberi wewenang mengelola keuangan daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

KEENAM : Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

KETUJUH : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

KEDELAPAN : Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.

KESEMBILAN : Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah.

KESEPULUH : Jika Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sedang menjalani cuti, diklat, dan sakit maka untuk penandatangan dokumen pencairan dapat dilaksanakan oleh pejabat yang mewakili/pejabat yang diberi kuasa, sampai Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan tugas kembali.

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.

KEDUABELAS : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Januari 2023

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 1/KEP/BAKEUDA/I/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

No.	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah	Koordinator pengelolaan Keuangan Daerah : 1. Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; 3. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 4. Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD; 5. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 6. Memimpin TAPD.
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah	1. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas : a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah; b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda; d. Melaksanakan fungsi BUD; dan e. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah antara lain : - menandatangani SPP dan kwintasi dana bagi hasil, hibah dan bantuan keuangan propinsi. - menandatangani bukti penerimaan dana transfer pemerintah pusat - menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP) - dan tugas lain yang dilimpahkan kepala daerah f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
		2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah mempunyai wewenang: a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah; e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah; f. Menetapkan anggaran kas dan SPD; g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah; h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah; i. Menyajikan informasi keuangan daerah; dan j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah. k. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; l. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu: - mengelola investasi; - menetapkan anggaran kas; - melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D; - membuka rekening kas umum daerah; - membuka rekening penerimaan; - membuka rekening pengeluaran, dan - menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawan pelaksanaan APBD. m. Menandatangani dokumen keuangan antara lain : - Surat Penyediaan Dana (SPD) - DPA-OPD / DPPA OPD - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Surat Penolakan Penerbitan SP2D - dan dokumen lain yang di limpahkan kepala daerah
3.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah	1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah; 2. Penyusunan kebijakan petunjuk teknis, operasional dan petunjuk pelaksanaan sistem administrasi pendapatan daerah; 3. Perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi serta pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat yang berbasis teknologi informasi. 4. Melakukan penetapan pajak daerah. 5. Melakukan penandatanganan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dengan nominal sampai dengan 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

No.	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
4.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah	1. Melakukan penagihan ketetapan pajak daerah; 2. Melakukan penagihan dan penyusunan serta mengusulkan kebijakan terhadap piutang pajak daerah; 3. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah secara berkala; 4. Membuat kajian dan mempertimbangkan terhadap permohonan pengurangan dan/atau keberatan pajak daerah maupun terkait pembatalan ketetapan pajak daerah; 5. Menyusun kebijakan terhadap rangkaian pemungutan pajak daerah.
5.	Kepala OPD, Kepala UPT, Kepala Bagian, dan Pejabat lain apabila di tunjuk sebagai PA / KPA	1. Selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas: a. Menyusun RKA dan DPA SKPD; b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan; c. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; e. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah; g. Menandatangani SPM; h. Mengelola barang milik daerah; i. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; l. Menetapkan PPTK dan PPK SKPD; m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: - menyusun anggaran kas SKPD; - melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah; - menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah (NPHD); - menyusun dokumen pemberian bantuan sosial; - menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut; - menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. p. Pejabat yang diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas dikarenakan Pejabat Definitif belum ada maka tugas dan wewenang sama dengan Pengguna Anggaran dan disebut sebagai Pengguna Anggaran

No.	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
		2. Selaku Kuasa Pengguna Anggaran a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; b. Melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; e. Menandatangani SPM TU dan SPM LS f. Mengelola barang milik daerah g. Mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab unit kerja h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja i. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya j. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah; k. Melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.
6.	Bendahara Pengeluaran	1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP LS; 2. Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU serta melakukan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya; 3. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 5. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik, dan; 6. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7 Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan keperbendaharaan selaku bendahara pada OPD.
7.	Bendahara Penerimaan	Menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya dalam rangka pelaksanaan APBD.
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS; 2. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran; 3. Menerima dan menyimpan TU dari BUD; 4. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;

No.	JABATAN	TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3
		5. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik, dan;
9.	Bendahara Penerimaan Pembantu	Menerima, menyimpan, menyetorkan dan menatausahakan serta mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan daerah yang diterimanya dalam rangka pelaksanaan APBD.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 1 /KEP/BAKEUDA/I/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

PEJABAT PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

No	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3
1.	Budiyanto, S.Kom, M.Si 197212012005011008	Bendahara Umum Daerah
2.	Devy Ingson Syahputera, S.Kom 197712102009031002	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
3.	M. Hartomo Effendi, SH 198706132010011004	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 1/KEP/BAKEUDA/I/2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023

DAFTAR PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN / BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
1.	SEKRETARIAT DAERAH	
1.1	Radmida Dawam, SH, MH 196401271993032001	Pengguna Anggaran
1.2	Gema Brata Yudha N.M, A.Md 198607102020121002	Bendahara Pengeluaran
2.	DPRD / SEKRETARIAT DPRD	
2.1	Drs. Akhmad Elvian 196510141989031004	Pengguna Anggaran
2.2	Syahrial 198311152008011005	Bendahara Pengeluaran
3.	INSPEKTORAT	
3.1	Muhamad Syahrial, SH, MH 197107132005011006	Pengguna Anggaran
3.2	Siswanto 19660306198603 1 007	Bendahara Pengeluaran
4.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
4.1	M. Belly Jawari, ST, M.Si 197907252005011008	Pengguna Anggaran
4.2	Harwanty, A.Md 197209292011012001	Bendahara Pengeluaran

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
5.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	
5.1	Fahrizal, ST 198502062008041001	Pengguna Anggaran
5.2	Herdoni 198403222010011001	Bendahara Pengeluaran
6.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
6.1	Donal Tampubolon. AP, M.Si 197505221993111001	Pengguna Anggaran
6.2	Ariesta Aviadevi. A 197504022009012006	Bendahara Pengeluaran
7.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
7.1	Endang Supriadi, ST, MT 197606122000031003	Pengguna Anggaran
7.2	Citra Beben, SH 198106202012121002	Bendahara Penerimaan
7.3	Lia Safriyani, A.md 198610252011012011	Bendahara Pengeluaran
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
8.1	Ir. Izwarhadi, M.T 196612071997031001	Pengguna Anggaran
8.2	Banu Tanzili, A.Md 199202112022031006	Bendahara Pengeluaran
9.	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	
9.1	Samri, SP, M.Si 197205041993031006	Pengguna Anggaran
9.2	Ika Fitria Yuslianti, S.PSi 198309072008042002	Bendahara Penerimaan
9.3	Muhammad Rifki, A.Md 199505252020121004	Bendahara Pengeluaran

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
10.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
10.1	Bartholomeus Suharto, ST, M.Si 197208241998031002	Pengguna Anggaran
10.2	Sulastri, A.Md 198009012007012015	Bendahara Penerimaan
10.3	Alde Fatrian Hafidz 198707192020121001	Bendahara Pengeluaran
11.	BADAN KEUANGAN DAERAH	
11.1	Budiyanto, S.Kom 197212012005011008	Pengguna Anggaran
11.3	Desti Aryati, A.Md 198412032011012004	Bendahara Penerimaan
11.4	Syaftiansah, A.Md 198010062014071004	Bendahara Pengeluaran
12.	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	
12.1	Andika Saputra, SH, MH 198302082009031005	Pengguna Anggaran
12.2	Nopi Sansia 198011102009012009	Bendahara Penerimaan
12.3	Andi Achmad 197811292008011002	Bendahara Pengeluaran
13.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
13.1	Erwandy, SE, MM 197207202006041004	Pengguna Anggaran
13.2	Yulianti Fitriani, S.Pd. SD 198207232014072001	Bendahara Pengeluaran

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
14.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
14.1	Mie Go, ST, M.Si 197301072000031005	Pengguna Anggaran
14.2	Suhiyat, SE 197010082009011003	Bendahara Pengeluaran
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
15.1	Febri Yanto, S.IP 198802152010101001	Pengguna Anggaran
15.2	Gilang Gevara, S.Tr.IP 199903262021081001	Bendahara Pengeluaran
16.	DINAS SOSIAL	
16.1	Khotaman Barka, S.STP, M.Tr.I.P 198302102001121002	Pengguna Anggaran
16.2	Selfia Indarina 197809292007012018	Bendahara Pengeluaran
17.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
17.1	Darwin, S.Pd. Mat 196807091994121002	Pengguna Anggaran
17.2	Sri Maryanti 199102172011012001	Bendahara Pengeluaran
18.	DINAS PARIWISATA	
18.1	M. Yasin, SE, MM 197311222002121006	Pengguna Anggaran
18.2	Ramses Simanjorang, SE 199411162020121001	Bendahara Penerimaan
18.3	Liyana, SH 198408072010012003	Bendahara Pengeluaran

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
19.	DINAS PERHUBUNGAN	
19.1	Drs. Ubaidi 196412101992031006	Pengguna Anggaran
19.2	Bangun Ludiro Permadi, A.Md 198306192010011006	Bendahara Penerimaan
19.3	Yunarni, A.Md 197706202010012004	Bendahara Pengeluaran
20.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
20.1	Efran, S.STP, M.Tr.I.P 198207072001121005	Pengguna Anggaran
20.2	Asriadi 197006272006041003	Bendahara Penerimaan
20.3	Cesilia Kunthi Enggarkasi, A.Md 199211222020122001	Bendahara Pengeluaran
21.	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA	
21.1	Yan Rizana, ST, M.Si 197601232005011006	Pengguna Anggaran
21.2	Dewi Sartika, A.Md 198205062010012015	Bendahara Penerimaan
21.3	Salbiah, S.Ap 197408142007012032	Bendahara Pengeluaran
22.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
22.1	Dr. Hj. Eti Fahriaty, S.Pd.I, M.Pd 196507241987032002	Pengguna Anggaran
22.2	Sulisdiana 198004192006042004	Bendahara Pengeluaran

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
23.	KECAMATAN BUKIT INTAN	
23.1	Yansyah Tri D. Putra, S.STP 197601101996021003	Pengguna Anggaran
23.2	Oskan Chandra Amarta 197510022009011003	Bendahara Pengeluaran
24.	KECAMATAN RANGKUI	
24.1	Muhammad Subhan, SE, M.Si 196901052006041001	Pengguna Anggaran
24.2	Tri Handayani, A.Md 197408092014072002	Bendahara Pengeluaran
25.	KECAMATAN GERUNGGANG	
25.1	Richard Syam, S.STP, M.AP 198604292006021001	Pengguna Anggaran
25.2	Supianto 198002122012121002	Bendahara Pengeluaran
26.	KECAMATAN TAMAN SARI	
26.1	Raelan Hafizh, S.STP, M.Si 198301312001121001	Pengguna Anggaran
26.2	Topan Firmansyah 198212112012121002	Bendahara Pengeluaran
27.	KECAMATAN PANGKALBALAM	
27.1	Purnamawan, SE 196905031993031007	Pengguna Anggaran
27.2	Sucipto 198209152006041007	Bendahara Pengeluaran

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
28.	KECAMATAN GABEK	
28.1	Yusnizar Cahyadi, S.STP 198406262002121001	Pengguna Anggaran
28.2	Norma Lestiowaty 19791014200701 2 003	Bendahara Pengeluaran
29.	KECAMATAN GIRIMAYA	
29.1	Luthfi Darma Saputra, SIP 198912042010101001	Pengguna Anggaran
29.2	Miranda Rosadi 198505152015022001	Bendahara Pengeluaran
30.	DINAS KESEHATAN	
30.1	dr. Masagus M. Hakim, M.Kes 197208282002121005	Pengguna Anggaran
30.2	Wahyudi, SKM 198708042010011001	Bendahara Penerimaan
30.3	Dewi Indra Sari, SE 198011202015022001	Bendahara Pengeluaran
31.	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
31.1	dr. Della Rianadita 198906032015022001	Kuasa Pengguna Anggaran
31.2	Seprianti, A.Md 198704142011012007	Bendahara Penerimaan Pembantu (BLUD)
31.3	Tamrin Halomoan L, SE 19780801201001 1 015	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
32.	UPT PUSKESMAS GIRIMAYA	
32.1	Emi Yuliani, SKM, MM 197107051991032001	Kuasa Pengguna Anggaran
32.2	Melza Arisantia, A.Md.AK 199401202022032009	Bendahara Penerimaan Pembantu
32.3	Sariniarti, A.Md 198108222011012005	Bendahara Pengeluaran Pembantu
32.4	Junita Sari, AMK 198206282010012020	Bendahara Dana Kapitasi JKN
33.	UPT PUSKESMAS AIR ITAM	
33.1	drg. Yandhi Kapriansya 198601152019021001	Kuasa Pengguna Anggaran
33.2	Ely Kurniati, A.mk 198106232006042026	Bendahara Penerimaan Pembantu
33.3	Liza, SKM 198905202019022005	Bendahara Pengeluaran Pembantu
33.4	Suciati, SKM 198412172019022002	Bendahara Dana Kapitasi JKN
34.	UPT PUSKESMAS PASIR PUTIH	
34.1	drg. Widiyanita Wahab 198501222010012016	Kuasa Pengguna Anggaran
34.2	Ade Risvan Situmeang, Amd, RMIK 199309192020121006	Bendahara Penerimaan Pembantu
34.3	Sundari, Amd, Farm 199504072019022007	Bendahara Pengeluaran Pembantu
34.4	Evi Fitriah, AM.Keb 197812252006042006	Bendahara Dana Kapitasi JKN

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
35.	UPT PUSKESMAS MELINTANG	
35.1	dr. Hisar Mangoloi Manalu 197603202005011007	Kuasa Pengguna Anggaran
35.2	Zulfa Mawaddah, SKM 198810032019022003	Bendahara Penerimaan Pembantu
35.3	Herlina, AMK 198011102006042017	Bendahara Pengeluaran Pembantu
35.4	Hanny Jauriah, AMK 197903232006042010	Bendahara Dana Kapitasi JKN
36.	UPT PUSKESMAS PANGKALBALAM	
36.1	Jonnimar, S.ST, M. Kes 197610092005011007	Kuasa Pengguna Anggaran
36.2	Imam Fatulloh, A.Md.RMIK 199206232020121002	Bendahara Penerimaan Pembantu
36.3	Yesy Octarianti, A.Md.Farm 199410312022032018	Bendahara Pengeluaran Pembantu
36.4	Ns. Jaifa Linda Sari, S.Kep 199201042022032008	Bendahara Dana Kapitasi JKN
37.	UPT PUSKESMAS SELINDUNG	
37.1	Gustri Olivianti, S.Kep 198308222009032005	Kuasa Pengguna Anggaran
37.2	Novita Sari, SKM 199011102009032001	Bendahara Penerimaan Pembantu
37.3	Mega Utami, A.Md.Gz 199910222022032003	Bendahara Pengeluaran Pembantu
37.4	Lastriyani, AMK 198409202010012007	Bendahara Dana Kapitasi JKN

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
38.	UPT PUSKESMAS GERUNGGANG	
38.1	Erna, SKM 198110032006042022	Kuasa Pengguna Anggaran
38.2	Irfah Baroroh, S.ST 199104052017022004	Bendahara Penerimaan Pembantu
38.3	Sulisa, AMKG 198711012010012023	Bendahara Pengeluaran Pembantu
38.4	Ria Carolina, AMK 198710192010012011	Bendahara Dana Kapitasi JKN
39.	UPT PUSKESMAS TAMAN SARI	
39.1	Andi Sartono, SKM 196610061986031004	Kuasa Pengguna Anggaran
39.2	Satya Oktafriana. Amd. KG 199510192019022005	Bendahara Penerimaan Pembantu
39.3	Evy Feriyani, SKM 198205052011012001	Bendahara Pengeluaran Pembantu
39.4	Henni Aprilia, Am.Keb 198404142006042009	Bendahara Dana Kapitasi JKN
40.	UPT PUSKESMAS KACANG PEDANG	
40.1	Drg. Cut Nur Laila 197511262006042015	Kuasa Pengguna Anggaran
40.2	Frenti Wijaya, A.Md.KG 198802272019022003	Bendahara Penerimaan Pembantu
40.3	Reski Amelia, A.Md 199104222019022005	Bendahara Pengeluaran Pembantu
40.4	Lisma, AMK 198303262006042005	Bendahara Dana Kapitasi JKN
41.	KELURAHAN BATU INTAN	
41.1	Fajar Wahyudi, SE 197511292006041012	Kuasa Pengguna Anggaran
41.2	Rokhani 19671122201212001	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
42.	KELURAHAN SEMABUNG BARU	
42.1	Wahyudi, A.Md 198208082011011002	Kuasa Pengguna Anggaran
42.2	Rangga Sumardiko 198105292007011003	Bendahara Pengeluaran Pembantu
43.	KELURAHAN SRIWIJAYA	
43.1	Dwiyuda Catur Suciwiana, SH 198007082007011004	Kuasa Pengguna Anggaran
43.2	Alpian 197803022007011006	Bendahara Pengeluaran Pembantu
44.	KELURAHAN BUKIT BESAR	
44.1	Yurdani, SH 198102042000031001	Kuasa Pengguna Anggaran
44.2	Dedi Erfandi 197905152007011028	Bendahara Pengeluaran Pembantu
45.	KELURAHAN PASAR PADI	
45.1	Herlan, SE 196701262006041002	Kuasa Pengguna Anggaran
45.2	Mareo Ebtana, SE 198503312011011004	Bendahara Pengeluaran Pembantu
46.	KELURAHAN RAWA BANGUN	
46.1	Yofanriansah, S.IP 198606212009031002	Kuasa Pengguna Anggaran
46.2	Murzali 196607061986031002	Bendahara Pengeluaran Pembantu
47.	KELURAHAN GEDUNG NASIONAL	
47.1	Suwanti, S.Mn 197712221999032001	Kuasa Pengguna Anggaran
47.2	Reeke Jost Pattiselano, SH 197709062006041012	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
48.	KELURAHAN KEJAKSAAN	
48.1	Yuli Akasiah, S.AP 198202022010012007	Kuasa Pengguna Anggaran
48.2	Herizon, SE 196910222009031001	Bendahara Pengeluaran Pembantu
49.	KELURAHAN BATIN TIKAL	
49.1	Aryan, SH 197606042008011002	Kuasa Pengguna Anggaran
49.2	Elly Heryani, A.Md, Keb 197804252006042021	Bendahara Pengeluaran Pembantu
50.	KELURAHAN OPAS INDAH	
50.1	Juni, SE 197906262008011003	Kuasa Pengguna Anggaran
50.2	Bellinda Purnamasari, SKM 198903052011012005	Bendahara Pengeluaran Pembantu
51.	KELURAHAN AIR SALEMBA	
51.1	Wawan Setiawan, S.IP 197810202008011004	Kuasa Pengguna Anggaran
51.2	Abdul Haris 196711182008011003	Bendahara Pengeluaran Pembantu
52.	KELURAHAN SELINDUNG BARU	
52.1	Teguh Arifianto, S.I.Kom 198612292010011010	Kuasa Pengguna Anggaran
52.2	Elizah Octarina, SE 198510052010012006	Bendahara Pengeluaran Pembantu
53.	KELURAHAN GABEK DUA	
53.1	Defi Gristina, SE 197912122014072003	Kuasa Pengguna Anggaran
53.2	Syaifudin 196508181986031014	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
54.	KELURAHAN GABEK SATU	
54.1	Ayu Eryanti, S.STP 199209222014062001	Kuasa Pengguna Anggaran
54.2	Sity Merry Aslamiyah, SE 198003152009042002	Bendahara Pengeluaran Pembantu
55.	KELURAHAN SELINDUNG	
55.1	Musyadi, SH 197907172008011007	Kuasa Pengguna Anggaran
55.2	Alyn, S.AP 198911172011012001	Bendahara Pengeluaran Pembantu
56.	KELURAHAN JERAMBAH GANTUNG	
56.1	Bambang Sumitro, S.IP 197311012006041006	Kuasa Pengguna Anggaran
56.2	Suswoyo, S.IP 197612122008011003	Bendahara Pengeluaran Pembantu
57.	KELURAHAN PASIR GARAM	
57.1	Fahlevi Pradidaya, ST 198605202015021003	Kuasa Pengguna Anggaran
57.2	Choppy Ismanto, S.Ikom 197911082007011012	Bendahara Pengeluaran Pembantu
58.	KELURAHAN REJOSARI	
58.1	Ahmat Pauzi, SH 197607022011011002	Kuasa Pengguna Anggaran
58.2	Hayuni Gita Devi, SE 198306112014072001	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
59.	KELURAHAN KETAPANG	
59.1	Daryansih, SKM 198204262005012005	Kuasa Pengguna Anggaran
59.2	Rehardiansyah, S.Ap 198006042007011015	Bendahara Pengeluaran Pembantu
60.	KELURAHAN LONTONG PANCUR	
60.1	Adly, S.Pd, SD 198109222010011012	Kuasa Pengguna Anggaran
60.2	Fath Dika Anugrah, SKM 198605292009041001	Bendahara Pengeluaran Pembantu
61.	KELURAHAN AMPUI	
61.1	Haryuda Putra, SH 198209142007011002	Kuasa Pengguna Anggaran
61.2	Budiarti Widiastuty, SKM 198003102011012003	Bendahara Pengeluaran Pembantu
62.	KELURAHAN KACANG PEDANG	
62.1	Ikhsan Sugiarto, S.STP, M.Tr.A.P 199009162012061001	Kuasa Pengguna Anggaran
62.2	Herlin 198109242007011004	Bendahara Pengeluaran Pembantu
63.	KELURAHAN BUKIT MERAPIN	
63.1	Yesi Hervina, SE 198202282008012005	Kuasa Pengguna Anggaran
63.2	Kurnia, S.IP 198506052007012003	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
64.	KELURAHAN AIR KEPALA TUJUH	
64.1	Basori Setiawan, S.STP, M.AP 198506302004121001	Kuasa Pengguna Anggaran
64.2	Zulfikri, S.IP 197911022007011005	Bendahara Pengeluaran Pembantu
65.	KELURAHAN BUKIT SARI	
65.1	Indri Oktania, SE 198510022011012004	Kuasa Pengguna Anggaran
65.2	A. Rizal 197002142006041003	Bendahara Pengeluaran Pembantu
66.	KELURAHAN TUA TUNU INDAH	
66.1	Iwan Bernadi, ST 198001182006041007	Kuasa Pengguna Anggaran
66.2	Suryana 197605062012122002	Bendahara Pengeluaran Pembantu
67.	KELURAHAN TAMAN BUNGA	
67.1	Indrajaya Kurnia, ST 198307282011011003	Kuasa Pengguna Anggaran
67.2	Randra Satiawan, S.STP 199305112017011001	Bendahara Pengeluaran Pembantu
68.	KELURAHAN ASAM	
68.1	Miftahus Surur, SP 196810171991031002	Kuasa Pengguna Anggaran
68.2	Wahyu Winarti, SE 197403012011012002	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
69.	KELURAHAN MELINTANG	
69.1	Imam Firdaus, SH 197107022007011005	Kuasa Pengguna Anggaran
69.2	Jhodi Priyotomo, A.Md 198705062010011006	Bendahara Pengeluaran Pembantu
70.	KELURAHAN GAJAH MADA	
70.1	Hayrul, S.AP 197811122008011004	Kuasa Pengguna Anggaran
70.2	Aisah 198107152007012005	Bendahara Pengeluaran Pembantu
71.	KELURAHAN KERAMAT	
71.1	Joni Badri, SE 197906272008011003	Kuasa Pengguna Anggaran
71.2	Usman James, SE 197010171993031001	Bendahara Pengeluaran Pembantu
72.	KELURAHAN PINTU AIR	
72.1	Jonsory Laviko, SKM 198301162010011012	Kuasa Pengguna Anggaran
72.2	Satibi Darwis, SE 197408152006041002	Bendahara Pengeluaran Pembantu
73.	KELURAHAN MASJID JAMIK	
73.1	Samsudin, S.Kom., MM 198110062014071002	Kuasa Pengguna Anggaran
73.2	Aisarisanti 197511052006042016	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
74.	KELURAHAN BINTANG	
74.1	Roy Ronaldi, SE 197911052010011011	Kuasa Pengguna Anggaran
74.2	Marhendri 196804151989031007	Bendahara Pengeluaran Pembantu
75.	KELURAHAN PARIT LALANG	
75.1	Djumri Sufrin, S.AP 197409062005011009	Kuasa Pengguna Anggaran
75.2	Misda Weni, S.STP 199206042015072001	Bendahara Pengeluaran Pembantu
76.	KELURAHAN PASIR PUTIH	
76.1	Randi Aprianto, S.STP, M.AP 198604202006021001	Kuasa Pengguna Anggaran
76.2	Sarmina, S.Pd 197409122007012012	Bendahara Pengeluaran Pembantu
77.	KELURAHAN BACANG	
77.1	Arli, SH 197007232001031001	Kuasa Pengguna Anggaran
77.2	Ami, SE 197208012008012006	Bendahara Pengeluaran Pembantu
78.	KELURAHAN AIR MAWAR	
78.1	Anton Martjuda, S.KS, S.STP 199003052012061001	Kuasa Pengguna Anggaran
78.2	Azza, S.AP 197807021999032001	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
79	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
79.1	Dr. dr. Masagus M. Hakim, M.Kes 197208282002121005	Pengguna Anggaran
79.2	Megawati, SKM 197612042006042003	Bendahara Pengeluaran
80.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
80.1	Dr. David Oktaviandi,. SP., MT 197410262002121004	Pengguna Anggaran
80.2	Andi Purnomo 198112162007011005	Bendahara Penerimaan
80.3	Nuryani 197105232006042012	Bendahara Pengeluaran
81.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
81.1	Manto, SE 196501061989031004	Pengguna Anggaran
81.2	Febran Sartaji, S.Psi 199502192020121001	Bendahara Penerimaan
81.3	Sumardianto, A.Md 197905082011011002	Bendahara Pengeluaran
82.	KELURAHAN SEMABUNG LAMA	
82.1	Rusdi, S.IP 198210032008011005	Kuasa Pengguna Anggaran
82.2	Reny Harianti, SKM 198303042006042015	Bendahara Pengeluaran Pembantu
83.	KELURAHAN AIR ITAM	
83.1	Nasrullah, A.Md 198003052007011004	Kuasa Pengguna Anggaran
83.2	Feriyawan, S.IP 197602232008011002	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
84.	KELURAHAN SINAR BULAN	
84.1	Yudi Januar Putra, S.STP 199301062014061001	Kuasa Pengguna Anggaran
84.2	Sudarwin 1978112023007011017	Bendahara Pengeluaran Pembantu
85.	KELURAHAN TEMBERAN	
85.1	Iswansyah, SH 197610122008011001	Kuasa Pengguna Anggaran
85.2	Dety Dwi Suranti, SE 197812042007012004	Bendahara Pengeluaran Pembantu
86.	BAGIAN UMUM	
86.1	Eko Priyanto, SE 198301132008041001	Kuasa Pengguna Anggaran
86.2	Waginem 198601132010012004	Bendahara Pengeluaran Pembantu
87.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
87.1	Dr. David Oktaviandi,. SP., MT 197410262002121004	Kuasa Pengguna Anggaran
87.2	Erwin Purnama 197401272007011003	Bendahara Pengeluaran Pembantu
88.	BAGIAN PEMERINTAHAN	
88.1	Irma Mutiahsari, S.S 197109072005012008	Kuasa Pengguna Anggaran
88.2	Syarifah Annisah, S.Sos 199704222020122001	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
89.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
89.1	Iskandar Aidul Fitri, SE 196801031990031003	Kuasa Pengguna Anggaran
89.2	Intan Kurnia, SE 198702052009032003	Bendahara Pengeluaran Pembantu
90.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
90.1	Drs. Juhaini 197406151999031002	Kuasa Pengguna Anggaran
90.2	Titin Apriani, S.T 199604292020122002	Bendahara Pengeluaran Pembantu
91.	BAGIAN ORGANISASI	
91.1	H. Saiful Akbari, S.IP, M.SI 197003221989031002	Kuasa Pengguna Anggaran
91.2	Siti Srianah, S.IP 198110202006042019	Bendahara Pengeluaran Pembantu
92.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
92.1	Haris Munandar, S.STP, M.Tr.I.P 198301152001121002	Kuasa Pengguna Anggaran
92.2	Wahyu Akhirudin 198308112008011002	Bendahara Pengeluaran Pembantu
93.	BAGIAN HUKUM	
93.1	Rusmi Toiyibah, S.AP 196908091990032002	Kuasa Pengguna Anggaran
93.2	Stephana Heri Krismiyati 197312262012122001	Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	SATUAN KERJA NAMA, NIP	JABATAN
1	2	3
94.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
94.1	Muhammad Rezeki 199209022016091001	Kuasa Pengguna Anggaran
94.2	Rasmilasari 198507132020122001	Bendahara Pengeluaran Pembantu

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL